

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PERTANIAN DI DESA UGI BARU KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh:

BERLIAN

10200113156

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879
Fax 8221400

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian
NIM : 10200113156
Tempat/Tgl. Lahir : Ugi Baru, 27 Juni 1995
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Poros Malino, Perumahan Bukit Tamarunang
Judul : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil
Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten
Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 17 Oktober 2017

Penyusun,


BERLIAN
NIM: 10200113156



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar*", yang disusun oleh *Berlian* NIM: *10200113156*, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, bertepatan dengan 27 Muharram 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 17 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag
Sekretaris : Dr. Syaharuddin, M.Si
Munaqisy I : Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si
Munaqisy II : Ahmad Efendi, S.E., M.M
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Thamrin Logawali, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat, Baginda Rasulullah SAW serta sahabat sampai kepada para pengikutnya yang senantiasa tetap istiqamah sampai akhir zaman.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Alm. Ayahanda dan Ibunda, yang selalu mengirimkan doa disetiap siang dan malamnya, Hana Sophia Halim yang selalu berbagi ilmu, memberikan motivasi semangat, dan memberikan titik terang dari setiap kesulitan yang terdapat dalam skripsi ini serta kepada para pembimbing Pak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) dan Pak Drs. Thamrin Logawali, MH (Sekretaris jurusan Ekonomi Islam) yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta dengan sabarnya memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah mereka berikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rector Universitas Islam Negeri Makassar beserta wakil rector I, II, III, IV

2. Bapak wakil dekan I, II, III, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat akademik kepada penulis
4. Para Bapak dan Ibu dosen yang selama ini dengan segala jerih payahnya memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan ilmu penulis.
5. Pegawai dan staf lingkungan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis selama menjalani masa studi.
6. Seluruh teman seperjuangan keluarga besar jurusan Ekonomi Islam, terkhusus EKIS D yang selalu saling memberikan dukungan.
7. Para Sahabat tercinta, Aisyah Mustafa yang juga ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik dari segi tenaga maupun doanya, Mega Hardina yang selalu memberikan semangat, serta Dewi Rosmalia, Siti Aminah, dan Nursam yang selalu menenangkan penulis setiap dalam kepanikan.
8. Keluarga besar Posko Induk Rumbia Kabupaten Jeneponto (Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Tri Imam Fakhurrazi, Hasrullah, Muh. Akbar, Suardi, Muh. Faisal, Nurfaizah Divia Maharani, Aswina, Herianti, Afrilian Cahyani Putri, Sri Mustika, dan Pujianti) yang telah kompak bekerjasama dengan penulis dalam pengaplikasian ilmu yang diterima selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amiiin

Billahi taufik wal Hidayah

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Makassar, 27 Oktober 2017

Penulis,

BERLIAN

NIM. 10200113156

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Akad dalam Islam	9
B. Pengertian Bagi Hasil Pertanian	12
C. Akad-akad Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian	15
D. ‘Urf.....	32
E. Kerangka konseptual.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian	44
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Alasan Masyarakat melakukan Praktek Kerja Sama	50
C. Pelaksanaan Kerja Sama dan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru.....	52
D. Pandangan Ekonomi Islam dari Segi Bentuk Kerjasama	55
E. Pandangan Ekonomi Islam dari Segi Bagi Hasil	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Nama : Berlian

Nim : 10200113156

Jurusan : Ekonomi Islam

**Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil
Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten
Polewali Mandar**

Masalah yang terjadi pada praktek kerja sama pertanian di Desa Ugi Baru adalah pemilik modal dan petani penggarap masing-masing menyediakan benih untuk menanam lahan pertanian kemudian bagi hasilnya dibagi 1/2. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem kerjasama tersebut sesuai dengan sistem muzaraah dan apakah bentuk pembagian hasilnya sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

Jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder). data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan dalam penelitian ini yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara yang diadakan selama beberapa minggu bahwa sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru memang tidak sesuai dengan teori yang berlaku dalam ekonomi Islam, namun kerjasama bagi hasil pertanian yang mereka lakukan mengikuti sistem yang sudah dilakukan sejak dulu oleh para pendahulunya, yaitu dengan menggabungkan dua benih antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kerjasama yang dilakukan di Desa Ugi Baru ini terkait dengan adat kebiasaan setempat atau dalam kaidah ushul fiqh disebut sebagai 'urf. 'Urf merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi kerjasama yang dilakukan ini sah-sah saja karena 'urf juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil Pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, “dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat”¹, mereka akan saling berhubungan satu sama lain maka itu, muamalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena untuk terciptanya segala hal yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dengan dapat saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.

Manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.²

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yaitu hubungan manusia dengan Allah swt (Hablum minAllah) diatur dalam bidang ibadah yang menyangkut dengan kehidupan akhirat dan hubungan secara timbal balik atau lebih sederhananya yaitu hubungan antara

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII, 2000), h. 11.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h.11

seseorang dengan orang lain (Hablu minAnnas) dalam pergaulan hubungan dunia atau bisa juga disebut sebagai kegiatan muamalah.³ Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat serta memberikan keuntungan bersama. Dalam hal ini adalah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.⁴ Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-maidah/5: 2 yang berbunyi:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga harus berusaha mencari karunia Allah (bekerja) yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Perintah bekerja disebutkan dalam QS An-Naba'/78 : 11

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 174

⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4.

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul,,Ali –ART, 2005), h. 84.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan”

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, didalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

“Islam akan membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya dan kemampuannya”.⁶ Banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Pekerjaan bertani dijelaskan dalam QS Yaasin/36: 33-35

وَأَيُّهُ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?”.⁷

⁶<http://pengusahamuslim.com/608-kewajiban-bekerja.html>

⁷Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 98

“Pertanian adalah aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang didasarkan pada tumbuh-tumbuhan.”⁸ “Seringkali ada orang yang ahli dalam pertanian tapi tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya.”⁹ Dalam hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dapat dilihat dari hadits berikut.

عن ابن عمر قل اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع (روه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar: sesungguhnya Nabi besar saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanaman”. (Riwayat Muslim)¹⁰

Salah satu faktor terjadinya kerjasama dalam pertanian adalah pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diwakili oleh orang lain. Praktek muamalah pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup dan bermukim. Di daerah pedesaan masyarakat pada umumnya menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, baik itu berupa

⁸Zaki Fuad Chalil, *pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 270

⁹Irfan, *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 82

¹⁰Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 226

pertanian yang bergerak pada bidang perkebunan maupun pertanian yang bergerak pada bidang persawahan. Seperti di desa Ugi Baru kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar yang menjadi lokasi penelitian ini umumnya masyarakat bergerak di bidang persawahan. Hal ini dikarenakan struktur wilayahnya yang sangat sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman padi, yaitu dataran yang luas dengan penyinaran matahari yang cukup ditunjang dengan sistim pengairan yang sangat baik karena wilayah ini dilintasi oleh Sungai Maloso yang cukup besar.

Praktek kerjasama pertanian dalam Islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, ada sebagai pemilik lahan dan ada sebagai penggarap dan salah satu dari keduanya menyediakan modal atau benih. Menurut informasi yang didapat oleh penulis dari wawancara awal, bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan pada desa ini, antara pemilik dan penggarap masing-masing menyediakan benih (menggabungkan) kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sehingga praktek demikian tidak sesuai dengan teori yang berlaku. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku jadi mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan berdasarkan sistem yang turun temurun dari pendahulu-pendahulunya atau biasa disebut dengan adat kebiasaan setempat

Oleh karena itu, melihat dari kasus tersebut, penulis meneliti mengenai pembagian hasil dari kerjasama pertanian ini, apakah sesuai dengan pandangan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sesuai dengan sistem muzaraah di Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman ?
2. Apakah pembagian hasil pertanian di Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam ?

C. Kajian Pustaka

Penyusunan skripsi ini, sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Selain itu peneliti juga mengkaji jurnal yang berkaitan dengan judul ini.

Adapun kajian-kajian tersebut adalah:

1. Skripsi Epi Yuliana “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” menyatakan bahwa bagi hasil merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
2. Skripsi Siti Machmudah “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di desa pademonegoro kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo” menyatakan bahwa sangatlah

diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang berada pada perekonomian tinggi dengan orang-orang yang berada di bawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain itu, juga mendapat bagian dari keuntungan.

3. Skripsi Iin Hamida “Kesesuain Konsep Islam dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur” menyatakan bahwa pertanian sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, diolah sendiri oleh yang punya lahan atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil.
4. Jurnal Faiz Zainuddin “Konsep Islam tentang adat” menyatakan bahwa urf merupakan suatu sumber hukum yang dapat menyelesaikan suatu problematika yang berkembang dalam masyarakat.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil pertanian di Ugi Baru kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar

- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian di Ugi Baru kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar

2. Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Dapat memahami sistem pembagian hasil pertanian di Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar
- b. Dapat memahami pandangan Ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian di Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad adalah “ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi.”¹¹ Sedangkan secara istilah akad terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Secara khusus, akad adalah pengaitan ucapan (ijab qabul) salah seorang yang berakad dengan yang lainnya pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Pengertian lain dari akad juga diungkapkan oleh Abu Bakar al-Jashshash bahwa akad merupakan sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib.

Jadi makna akad secara syar’i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan. Adapun kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 45

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad

Rukun akad terdiri dari, “aqid, ma’qud alaih, maudhu’ al-‘aqad, dan shighat al-‘aqad”

1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang
2. Ma’qud alaih, adalah benda-benda yang diakadkan
3. Maudhu’al-‘aqad, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
4. Shigat al-‘aqad, adalah ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya akad.¹²

b. Syarat-syarat akad

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
2. Ma’qud alaih harus
 - a. Ada ketika terjadi akad
 - b. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat
 - c. Barang atau benda dapat diserahkan ketika terjadi akad
 - d. Diketahui oleh pihak-pihak yang berakad
3. Ijab harus berjalan terus. Ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul

¹² Oni sahrani dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 71

4. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah¹³

3. Macam-macam Akad

a. Berdasarkan ketentuan syara'

1. Akad sah
2. Akad ghairu sah¹⁴

Akad sah, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka akad tersebut masuk dalam kategori akad sah.

Akad ghairu sah, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

b. Berdasarkan zatnya, dibagi menjadi:

1. Benda yang berwujud (*al-'ain*), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra
2. Benda tidak berwujud (*ghair al-'ain*), yaitu benda yang tidak dapat kita indra namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.

c. Berdasarkan dari aspek target, dibagi menjadi:

1. Akad yang bertujuan tamaluk (memiliki objek akad) seperti jual beli, hibah, dan wasiat.

¹³Lihat, Oni sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, h. 71

¹⁴Oni sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, h. 71

2. Akad yang bertujuan bagi hasil, seperti akad syirkah, mudharabah, muzaraah dan mukhabarah.
3. Akad yang bertujuan sebagai jaminan, seperti akad rahn dan kafalah.
4. Akad yang bertujuan untuk memberikan kewenangan pada pihak lain seperti kafalah.
5. Akad yang bertujuan untuk pemeliharaan objek akad seperti akad wadiah.

B. Pengertian Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan (akad) bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Tujuan dari pertanian mencakup 2 hal; yang pertama ;

Usaha mendapatkan bagian atau keseluruhan dari tanaman-tanaman, biji-bijian, dedaunan dan sebagainya; yang kedua, usaha meningkatkan kegiatan ekonomi dari hasil produksi tersebut melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengawetan, dan kegiatan-kegiatan lain pascapanen.¹⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Pertanahan: dinyatakan bahwa :

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain

¹⁵Zaki Fuad Chalil, *pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam*, h. 270

yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹⁶

Berdasarkan maksud pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1960 menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat petani di Ugi Baru tentang sistem bagi hasil pertanian sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Jadi, bagi hasil pertanian adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi). Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah).¹⁷

Bagi hasil pertanian ini, merupakan suatu mekanisme bagi seorang pemilik asset (tanah) yang menyerahkan hak pengelolaan kepada orang lain dengan ketentuan pembagian hasil yang disepakati. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada “biaya pengelolaan, baik langsung berupa pengolahan lahan maupun tidak langsung berupa upaya yang lebih berat seperti waktu dan tenaga.”¹⁸ Dalam perjanjian bagi hasil terdapat para pihak antara satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu:

1. Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam islam dan disebutkan dalam

¹⁶Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), h. 334

¹⁷Lihat, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 158

¹⁸Lihat, Zaki Fuad Chalil, *pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi islam*, h. xxx

UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan secara produktif. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Pemilik lahan sendiri berhak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagi hasil sebesar nisbah yang telah diepakati, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut.

2. Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang dan mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu pihak penggarap kemudian akan menjalin kerjasama dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian dari hasil usahanya menggarap tanah pertanian. Berdasarkan pada kondisi tersebut, pihak penggarap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengembalikan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Pihak penggarap berhak atas kontraprestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya.

C. Akad-Akad Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian

Akad memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam persoalan muamalah. Dalam fiqhi islam, ada beberapa jenis akad, salah satunya yang dimaksud disini adalah akad kerjasama (bagi hasil) pertanian. Akad kerjasama (bagi hasil) dibidang pengolahan lahan pertanian dikenal dengan istilah musaqah, muzaraah, dan mukhabarah.

1) Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Secara etimologi musaqah adalah “bentuk kata yang mengikuti wazan (musaqiya) dari kata (asysyaqi) yang memiliki arti penyiraman.”¹⁹ Secara terminologi musaqah adalah “akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”²⁰ Dalam pengertian syara’ Musaqah adalah “penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.”²¹ Dalam definisi lain juga menyebutkan bahwa musaqah ialah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarapnya, sehingga kebun tersebut menghasilkan sesuatu. Hasilnya “menjadi milik kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.”²²

¹⁹Husain Al Habsyi, *Kamus Al-kaustar(Arab-Indonesia)*, (Surabaya p.p.ASSEGAFF, 1977), 184.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119-120.

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 183.

²² H. Minhajuddin, *Fikih Mu’amalah dalam Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 214.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya pemilik lahan mempekerjakan orang lain (petani) untuk mengelola kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya dengan ketentuan hasil kurma dan anggur itu menjadi milik berdua.²³

b. Hukum Musaqah

Hukum musaqah adakalanya fasid dan adakalanya fasid

1) Hukum musaqah shahih

Menurut ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih apabila

- a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedang biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua
- b) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan
- c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa
- d) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak
- e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur
- f) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati
- g) Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain kecuali diizinkan oleh pemilik.²⁴

2) Hukum musaqah fasid

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diepakati syara'. Menurut ulama Hanafiyah, musaqah fasid apabila:

- a) Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan
- b) Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad
- c) Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.²⁵

²³ Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad dalam Islam*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h.104.

²⁴ Azharudi Latift, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

²⁵ A. Azharudi Latift, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

c. Rukun dan syarat musaqah yaitu:

1) Rukun musaqah

- a) Shigat
- b) Dua belah
- c) Kebun
- d) Masa kepemilikan .
- e) Buah.²⁶

Shigat, adalah pernyataan yang disampaikan pada waktu aqad, misalnnnya “aku mengadakan akad musaqah denganmu atas kebun kurma ini dengan upah sepertiga atau seperempat dari buah yang dihasilkannya, atau “aku serahkan kebun kurma ini kepadamu untuk kamu sirami dan rawat, atau bekerjalah menyirami dan merawat kebun kurma ini dengan upah sekian dari buah yang dihasilkan.

Dua belah pihak. Baik pemilik kebun maupun tukang kebun (yang mengerjakan keduanya hendaklah orang yang sama-sama berhak bertasarruf/membelanjakan harta keduanya).

Kebun, yaitu semua pohon yang berbuah, boleh diparokan, demikian juga hasil pertahun (palawija) boleh pula diparokan. Yang kita maksud dengan hasil pertahun atau palawija adalah semua tanaman yang hanya berbuah satu kali, sesudah satu kali itu pohonnya lalu mati, misalnya padi, jagung, dan sebagainya. Tanaman ini kita bedakan dengan buah-buahan yang lain kaena hukumnya sering berbeda

Pekerjaan hendaklah ditentukan masanya, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih, sekurangkurangnya kira-kira menurut kebiasaan dalam masa itu kebun

²⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh)*, Jakarta: Sinar Baru, 1994), h. 301.

sudah mungkin berbuah. Pekerjaan yang wajib dikerja oleh tukang kebun adalah semua pekerjaan yang bersangkutan dengan penjagaan kerusakan dan pekerjaan (perawatan yang berfaedah) untuk buah, seperti menyiram, merumput, dan mengawinnkanya. Hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun), misalnya seperdua, seprtiga, atau beberapa saja asal berdasarkan kesepaatan keduanya pada waktu akad.

2) Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Ahli dalam akad.
- b) Menjelaskan bagian penggarap.
- c) Membebaskan pemilik dari pohon.
- d) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e) Sampai batas akhir²⁷.

2) Muzaraah.

a. Pengertian Muzaraah

Menurut etimologi muzara'ah adalah bentuk kata yang mengikuti wazan dari kata yang berarti menumbuhkan.²⁸ Pengertian yang pertama merupakan arti majaz, sedangkan pengertian yang kedua adalah makna haqiqi. Oleh karena itu “terdapat larangan seorang manusia mengucapkan saya telah menumbuhkan hendaklah ia mengucapkan, saya bertani.”²⁹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-waqiah/56: 63-64

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 214.

²⁸ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 1999), h. 1875.

²⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Moh. Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), h.15

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٦﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam?. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?”³⁰

Pengertian muzara’ah menurut terminologi yang dikemukakan oleh para imam mazhab dan Ulama’ fiqih lainnya, antara lain:

1) Menurut mazhab Maliki.

Muzaraah adalah “perkongsian dalam bercocok tanam”³¹

2) Menurut mazhab Syafi’i.

Muzara’ah adalah “mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah”³²

3) Menurut mazhab Hanabilah.

Muzaraah adalah “menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasil tanamannya dibagi antara keduanya”³³

Selanjutnya, Ulama fiqih mengemukakan pengertian tentang muzara’ah, sebagai berikut :

³⁰Derpateman Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-ART, 2005), h. 534

³¹Andi Intan Cahyani, *Fiqhi Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 150.

³²Andi Intan Cahyani, *Fiqhi Muamalah*, h. 150

³³Andi Intan Cahyani, *Fiqhi Muamalah*, h. 150

4) Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri

Muzara'ah adalah “pekerjaan mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal pemilik tanah.”³⁴

5) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan pertanian menyerahkan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian persentase dari hasil panennya.”³⁵

6. Menurut Sulaiman Rasyid

muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.³⁶

7. Menurut Mawardi

Muzaraah adalah “menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen.”³⁷

b. Pendapat para Ulama tentang Akad Muzaraah

1) Pendapat Yang Memperbolehkan Muzara'ah

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hambali dan Dawud Ad-Dzahiry. Mereka menyatakan bahwa “akad muzara'ah diperbolehkan

³⁴Lihat, Belajar Ekonomi Syari'ah, faizlife.blogspot.com/2012/04/ muzara'ah.html

³⁵Lihat, Belajar Ekonomi Syari'ah, faizlife.blogspot.com/2012/04/ muzara'ah.html

³⁶Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al- Basri,al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I Juz VII, (Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994), h. 451.

³⁷Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al- Basri,al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I Juz VII, h. 451.

dalam Islam³⁸.” Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma’ dan dalil ‘aqli.

a) Al-qur’an. Surah az-Zukhruf/43: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁹

Ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

b) Hadits

عن ابن عمر قل اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بشر ما يخرج من ثمر او زرع (روه مسلم)

Artinya:

Dari ibnu Umar: sesungguhnya Nabi besar SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian

³⁸Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, (Damaskus: Vol. V, Dar al-Fikr, 2008), h. 483

³⁹Derpateman Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2005), h. 489

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan”. (Riwayat Muslim)⁴⁰

c) Ijma’

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek muzara’ah dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehan nya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya muzara’ah dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma’.⁴¹

d) Dalil ‘aqli

Muzara’ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudharabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

2) Pendapat Yang Melarang Muzara’ah

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa muzara’ah tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa “muzara’ah itu fasidah (rusak) atau dengan kata lain muzara’ah dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya

⁴⁰Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 226

⁴¹Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syamil fi Muamalat wa amaliyat al-Masharif al-Islammiyyah*, (Yordania: Dar an-Nafais, 2007), h. 151

tidaklah dibenarkan.⁴² Para ulama yang melarang akad muzara'ah menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

a. Hadist

ان رفع ابن خديج قل كنا نخابر على عهد رسول الله فذكر ان بعض عمومته اتاه وقال نهي رسول الله عن عمر كان لنا نافعاً وطوا عبة الله ورسوله انفع لنا وانفع قال: قلنا: وما ذلك؟ قال رسول الله من كانت له ارض فليزرعها اخاه ولا يكارهها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى (روه مسلم وابو داود)

Artinya:

Diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij R.A, ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil tertentu (mukhabarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)⁴³

b. Dalil Aqli

Muzara'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya ma'dum (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan majhul karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jahalah dan ketiadaan mahallul 'aqdi akan merusak akad ijarah.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 276

⁴³<https://hanialfarouqy.wordpress.com>

3) Sanggahan Terhadap Pelarangan Muzara'ah

Pendapat yang melarang muzara'ah ini dibantah oleh para ulama sebagai berikut:

Akad muzara'ah bukanlah bagian dari akad Ijarah, akan tetapi bagian dari mudharabah. Dalam akad mudharabah, kesepakatan persentase pembagian hasil boleh ditentukan diawal dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam muzara'ah. Ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh muzara'ah dibandingkan penyewaan tanah biasa. Dalam muzara'ah 'upah' yang didapat adalah persentase sebenarnya dari hasil panen yang didapat dari tanah garapan baik itu seperempat, setengah atau sepertiganya. Sedangkan dalam penyewaan tanah biasa, upah yang didapat oleh pemilik tanah adalah jumlah tertentu baik berupa uang atau barang (hasil bumi) yang bukan merupakan hasil dari tanah garapan, ataupun mungkin hasil dari tanah garapan akan tetapi jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa dasar presentase dari awal, satu ton gandum misalnya atau 100 kg beras dan sebagainya.⁴⁴

c. Rukun dan syarat muzaraah

1) Rukun Muzaraah

Jumhur ulama menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar akad muzaraah itu menjadi sah, yaitu:

- a) Ijab qabul (akad).
- b) Penggarap dan pemilik tanah (akid).
- c) Adanya obyek (ma'qud ilaih).⁴⁵

Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

⁴⁴<https://hanialfarouqy.wordpress.com>

⁴⁵Nasrun harun, *Fihi Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang di ambil.

2) Syarat Muzaraah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, yaitu “muazaraah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid, tanaman, tanah yang ditanami, tanaman yang dihasilkan, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.”⁴⁶

a. Syarat 'aqid

1. Baligh
2. Berakal
3. Islam

b. Syarat tanaman

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

c. Syarat lahan garapan

1. Lahan memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan
2. Jelas lahannya
3. Ada penyerahan lahan

⁴⁶Andi Intan Cahyani, *Fihi Muamalah*, h. 153

d. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

1. Jelas ketika akad
2. Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad
3. Ditetapkan persentase hasil pertanian diantara keduanya
4. Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang melangsungkan akad

3. Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, muzaraah dipandang rusak.

4. Syarat Muzaraah

Akad muzaraah harus menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, muzaraah dipandang tidak sah.⁴⁷

d. Bentuk-bentuk muzaraah

Ada empat bentuk muzara'ah, yaitu:

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja. Sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga sah.

⁴⁷Andi Intan Cahyani, *Fiqhi Muamalah*, h. 153

- 3) Apabila lahan, dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani sehingga yang menjadi objek muzara'ah ialah jasa petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- 4) Apabila lahan petani dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikuti pada lahan, menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah sedangkan manfaat lahan hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.

e. Hukum Muzaraah

1) Muzaraah Shaih

Muzaraah menurut ulama Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan, adalah menjadi beban penggarap, karena akad muzaraah secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- c. Hasil tanaman yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.
- d. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak

ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut.⁴⁸

2) Hukum muzara'ah yang fasid

Menurut Hanafiyyah ada beberapa ketentuan untuk muzara'ah yang fasid, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan muzara'ah karena akadnya tidak sah.
- b. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah atau penggarap. Dalam masalah ini Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya fasid, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fasidnya akad Muzara'ah tersebut.
- d. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.
- e. Dalam muzara'ah yang fasid, apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka dia wajib diberi upah yang sepadan (ujratul misli), meskipun tanah yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena akad muzara'ah statusnya sebagai akad ijarah (sewa-menyewa).
- f. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (ujrah misli) dalam muzara'ah yang fasid harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar secara penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.⁴⁹

3) Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 572.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 402-403

bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.⁵⁰ Demikian juga dalam masalah mukhabarah tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian mukhabarah, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai mukhabarah dengan upah sekian”. Lalu pihak penggarap berkata, “Aku terima” atau “Aku setuju” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini sudah terjadi, maka berlakulah akad al-mukhabarah diantara keduanya. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun mukhabarah ada 4 macam:

- 1) Ada tanah yang dikelola.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan pengelola.
- 3) Benih.
- 4) Alat pertanian⁵¹.

b. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.

Selain rukun yang disebutkan di atas ada pula syarat dari mukhabarah, yaitu:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan, jelas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 3) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.

⁵⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 391.

⁵¹<https://muhammadnurhadi.wordpress.com>

4) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.⁵²

4) Dasar Hukum Akad Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah

حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن خابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بثلث والرابع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فان لم يفعل فليمسك ارض (روه بخيري وابو حريرة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". (HR Bukhari dan Abu Hurairah)⁵³.

عن ابن عمر قل اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع (روه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar: sesungguhnya Nabi besar SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan". (Riwayat Muslim)⁵⁴

Dasar hukum lainnya adalah ijma ulama bahwa telah berkata Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak

⁵²<https://muhammadnurhadi.wordpress.com>

⁵³Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 226

⁵⁴Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 226

seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah “suatu ijma sukuti (konsesus) dari umat.”⁵⁵

5) Berakhirnya Akad Musaqah, Muzaraah dan Mukhabarah

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
- b. Apabila salah seorang yang berakad wafat.
- c. Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

⁵⁵Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 110

- 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁵⁶

6) Hikmah Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah

- a. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Tertanggulangnya kemiskinan.
- d. Terbuka lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

D. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.⁵⁷ 'Urf (tradisi) adalah “bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat”.⁵⁸ Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik urf perkataan maupun urf perbuatan.⁵⁹ Ulama Ushuliyin memberikan definisi, “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok

⁵⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 280-281.

⁵⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (cet ke-1; Jakarta: Amzah, 2009), h. 167.

⁵⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (cet ke-14; Jakarta: pustaka firdaus, 2011), h. 416.

⁵⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (cet ke-1; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 77

manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.”⁶⁰

Adapun makna ‘urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁶¹

Jadi, urf merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara’.

‘Urf dapat memberikan solusi terhadap proses penentuan hukumnya. Oleh karena itu ‘urf merupakan sesuatu yang bisa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash Al-Qur’an. Selain itu ‘urf juga bisa mendatangkan kemashlahatan.⁶²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

⁶⁰Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (cet-; Surabaya: Diantama, 2008), h. 110

⁶¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (cet ke-2; Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.

⁶²Faiz Zainuddin, Konsep Islam tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 7, No.2, Desember 2015, h. 380

2. Macam-macam ‘Urf

a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada:

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-‘Urf al-lafdzi). Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah “kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.”⁶³ Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.
- 2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali). Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah “kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah.”⁶⁴ Seperti kebiasaan masyarakatnya melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah dengan menggabungkan dua benih antara pemilik sawah dan penggarap.

b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi:

- 1) Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am). Kebiasaan yang umum adalah “kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh negara.”⁶⁵
- 2) Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah “kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.”⁶⁶

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

⁶⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 77.

⁶⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h. 418.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu:

- 1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-'Urf sahih). Kebiasaan yang dianggap sah adalah "kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka."⁶⁷
- 2) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-Urf fasid). Kebiasaan yang dianggap rusak adalah "kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara."⁶⁸

3. Kehujjahan urf

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti urf tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syari'at islam. Mengenai kehujjahan urf menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya yaitu golongan Hanafiyah dan Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al A'raaf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (cet ke-6; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 135.

⁶⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 154.

⁶⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, h. 419.

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.⁶⁹

Ayat ini bermaksud bahwa urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat 'am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.⁷⁰

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasanya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al qur'an ataupun sunnah.

4. Kaidah-kaidah 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan urf pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu al Qayyim al Jauziyah bahwa "tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat", maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, diantaranya:

⁶⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151

⁷⁰Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 167.

a. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

b. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ.

(Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat)

c. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

(Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat)

d. النَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالنَّابِتِ بِالنَّاصِ

(Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al Qur'an atau hadits)).⁷¹

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

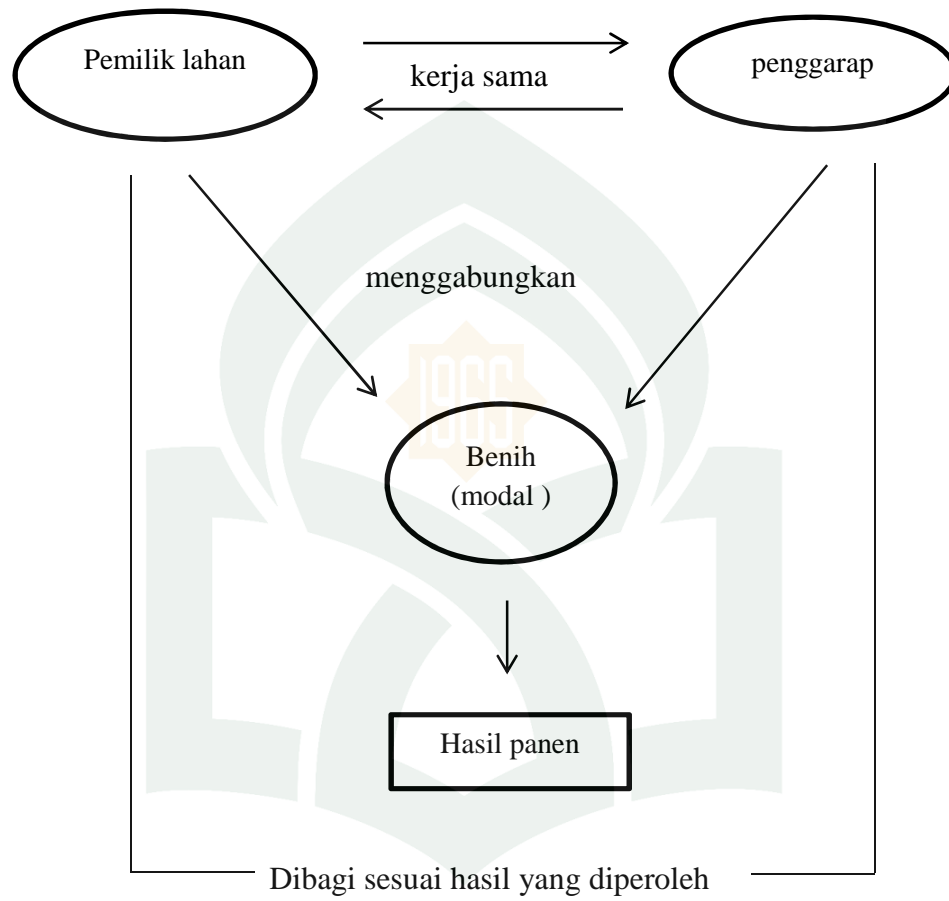
5. Syarat-syarat 'Urf untk dijadikan landasan hukum

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulangulang. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits.
- c. Tidak mendatangkan kemudharatan.⁷²

⁷¹Chaerul Uman, *Ushul Fiqhi I*, h. 164.

⁷²Totok Jumanoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 3.

E. Kerangka Konseptual



Di ugi baru kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar melakukan kerjasama pertanian dalam hal ini terdapat pemilik lahan dan penggarap, keduanya menggabungkan benih untuk menanami lahan teersebut tersebut lalu kemudian setelah panen hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan

BAB III

METEODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif karena penulis mengumpulkan fakta yang ada sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai penerapan bagi hasil.

Menurut Husein Umar penelitian deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan kualitatif berarti penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.⁷³ Selain itu kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai metode yang penelitiannya berdasar pada kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia atau kelompok social yang telah dicatat atau dikumpulkan.⁷⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis. Penelitian studi kasus

⁷³Elib unikom.ac.id. diakses tanggal 27 November 2015 pukul 12:24

⁷⁴Afrizal, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja gafindo persada, 2015) h. 15

merupakan “suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.”⁷⁵ Dalam pengertian lain, studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada “intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya.”⁷⁶

Kahija (2006) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu penelitian satu atau beberapa kasus dengan menggali informasi dari beberapa sumber. Dalam bukunya Mukhtar (2013) mengungkapkan bahwa metode penelitian ini sangat cocok digunakan saat seorang peneliti ingin mengungkap sesuatu dengan bertolak pada pertanyaan “*How*” atau “*Why*”. Dilihat dari sudut kegunaannya, studi kasus dapat dipakai untuk penelitian kebijakan, ilmu politik, dan administrasi umum, pendidikan, psikologi, dan sosiologi, studi organisasi dan manajemen, lingkungan dan agama, dan sebagainya.⁷⁷

C. *Sumber Data*

Data dapat didefinisikan sebagai “sekumpulan informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.”⁷⁸

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah “subjek dari

⁷⁵Emzir, *Metode penelitian kualitatif analisis data*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h.20.

⁷⁶ www.menulisproposalphelitian.com

⁷⁷Dewi Rokhmah, dkk, *metode penelitian kualitatif*, (Jember: Jember University Press, 2014), h. 7-8.

⁷⁸Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 84

mana data itu diperoleh”.⁷⁹ Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, “mempelajari dan memahami buku-buku, artikel (internet), literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap”.⁸⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian dari berbagai sumber yang didapatkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Metode interview atau wawancara

Esteberg (2002) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dirumuskan makna dalam suatu topik tertentu.⁸¹

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129

⁸⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128.

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 231

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah mengemukakan bahwa penelitian survei dengan metode wawancara memiliki keuntungan antar lain; tingkat pengembalian sangat tinggi, kemungkinan membuat pertanyaan yang panjang dan kompleks karena pewawancara dapat melakukan probing, dapat menggunakan alat visual, dan dapat mengamati perubahan perilaku.⁸²

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada “laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.”⁸³ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, dalam wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, pengumpul data atau peneliti mencatatnya. Pedoman wawancara terstruktur disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list, pewawancara tinggal membutuhkan tanda pada nomor yang sesuai.
- b. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara

⁸²Bambang Prasetyo dan miftahul Jannah, *Meteorologi Penelitian dan Kuantitatif*, (Jakarta Raja: Grafindo Persada, 2005) hal 153.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Metode observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

Menurut Patton dalam Nasution (1988), dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh.
- b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan yang sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau discovery.
- c. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara.
- d. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitive atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- e. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- f. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.⁸⁴

⁸⁴Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, h. 228

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu⁸⁵. Dokumen itu berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto digunakan oleh penulis dalam memperoleh informasi yang lebih akurat.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang ada dalam metode penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara.⁸⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

⁸⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Gabungan* (Jakarta: Fajar Interrpratama Mandiri, 2014), h. 391.

⁸⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 134.

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁷

Analisis data yang digunakan peneliti adalah metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (data display), maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (conclusion), merupakan perumusan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah.

Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah “aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.”⁸⁸

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 224.

⁸⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 177.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Mapillii berada diantara kecamatan luyo dan kecamatan wonomulyo, jaraknya dari ibu kota kabupaten sekitar 18 km. Kecamatan Mapilli berbatasan dengan kecamatan Bulu di sebelah utara, kecamatan wonomulyo dan Tapango di sebelah Timur, Kecamatan Luyo disebelah barat dan teluk mandar di sebelah selatan.

Di Kecamatan Mapilli terdiri atas satu kelurahan, yaitu kelurahan Mapilli dan sebelas desa yaitu desa buku, rumpa, ugi baru, bonne-bonne, kurma, rappang barat, beroangin, segerang, bonra, sattoko, dan Landi kanusuang. Selain itu Kecamatan Mapilli terdapat 3 lingkungan, Desa Kurma merupakan desa yang mempunyai jumlah dusun paling banyak yaitu 6 dusun. Desa Landi Kanusuang, Desa Bonra, dan Desa Buku ada 5 dusun. Desa Bonne-bonne, desa Rappang Barat, desa Beroangin, dan desa Segerang ada 4 dusun. Sedangkan desa Sattoko, Desa Ugi Baru dan Desa Rumpa hanya ada 3 dusun.

Kesebelas desa yang tersebut di atas desa Ugi Barulah yang menjadi lokasi penelitian penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Kependudukan

Kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah. Setiap daerah atau wilayah memiliki penduduk dimana penduduk tersebut memiliki perbedaan satu sama lain yaitu mengenai karakteristik, pekerjaan, serta jenis kelamin. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih.

Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian di kecamatan Mapilli, dimana masalah kependudukan mengenai jumlah rumah tangga, luas wilayah, kepadatan, serta jenis kelamin tercantum dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut.

Table 4.1

**Jumlah Rumah Tangga, Penduduk menurut Desa atau Kelurahan
di Kecamatan Mapilli, 2015**

Desa atau kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk (jiwa)	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ³)
Buku	564	2.544	7,50	339
Rumpa	625	2.636	7,25	364
Ugi baru	597	2.730	3,07	889
Segerang	309	1.326	2,43	546
Mapilli	574	2.776	3,13	887
Bonra	694	3.118	3,37	925
Rappang Barat	675	3.055	16,50	185
Landi Kanususang	462	2.164	2,00	108
Kurma	849	3.730	11,25	332
Bonne-bonne	562	2.435	2,50	974
Beroangin	321	1.387	12,25	113
Sattoko	146	642	2,50	257
Kecamatan Mapilli	6.378	28.543	91,75	311

Sumber: Buku Kecamatan Mapilli dalam Angka 2016 (BPS)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Mapilli sebesar 311 jiwa per Km³. Bila dilihat pada satu kelurahan dan sebelas desa yang ada, maka desa Bonne-bonne menempati posisi terpadat yaitu kepadatan sebesar 974 jiwa per Km³. Selanjutnya desa Bonra dengan kepadatan sebesar 925 jiwa per Km³. Sedangkan desa yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah desa Landi Kanusuang dengan kepadatan sebesar 108 jiwa per Km³

Tabel 4.2

**Jumlah Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan Dan Jenis Kelamin
Kecamatan Mapilli, 2015**

Desa atau kelurahan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Laki-laki + Perempuan (orang)
Buku	1.204	1.340	2.544
Rumpa	1.259	1.377	2.636
Ugi baru	1.325	1.405	2.730
Segerang	673	653	1.326
Mapilli	574	2.776	2.776
Bonra	1.542	1.576	3.118
Rappang Barat	1.507	1.548	3.055
Landi Kanususang	1.106	1.058	2.164
Kurma	1.871	1.859	3.730
Bonne-bonne	1.176	1.259	2.435
Beroangin	683	704	1.387
Sattoko	336	306	642
Kecamatan Mapilli	13.983	14.560	28.543

Sumber: Buku Kecamatan Mapilli dalam Angka 2016 (BPS)

Tabel 4.2 menunjukkan penduduk kecamatan Mapilli pada tahun 2015 tercatat sebesar 28.543 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 13.983 jiwa dan perempuan sebesar 14.560 jiwa yang tersebar di satu kelurahan dan sebelas desa. Desa Kurma

mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni 3.730 jiwa sedangkan desa yang mempunyai jumlah penduduk terkecil adalah desa Sattoko yakni sebesar 642 jiwa.

3. Pertanian

Pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman. Kegiatan-kegiatan produksi dalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, penulis melakukan penelitian yang menyangkut kegiatan usaha tani yaitu perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak (pemilik sawah dan petani penggarap) yang melakukan usaha kerjasama pertanian yang berlokasi di desa Ugi Baru kecamatan Mapilli.

Berdasarkan data badan pusat statistik, di kecamatan Mapilli terdapat empat jenis tanaman, yaitu padi sawah, jagung, ubi kayu, dan kacang hijau. Sedangkan yang menjadi informan dari penelitian ini adalah seorang petani yang bercocok tanam pada jenis tanaman padi sawah.

Tabel 4.3

Luas Tanam, Luas Panen, Dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenisnya Di Kecamatan Mapilli, 2015

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
Padi Sawah	3.915	4.515	30.707,00	6,80
Jagung	134	2	8,54	4,27
Ubi Kayu	3	3	79,34	13,11
Kacang hijau	4	5	10,70	2,14

Sumber: Buku Kecamatan Mapilli dalam Angka 2016 (BPS)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 di Kecamatan Mapilli, tanaman pangan seperti padi sawah luas tanamnya 3.915 ha, luas panennya 4.515 ha, produksinya 30.707,00 ton, tanaman jagung luas tanam 134 ha, luas panen 2 ha, tanaman ubi kayu luas tanamnya 3 ha, luas panennya 3 ha, tanaman kacang tanah luas tanam 1 ha, luas panen 0 ha, tanaman kacang kedelai luas tanam 22 ha, luas panen 0 ha, sedangkan tanaman kacang hijau luas tanam 4 ha dan luas panennya 5 ha, produksinya 10,70 Ton.

B. Alasan Masyarakat Melakukan Praktek Kerja Sama

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah seperti yang telah terjadi di Desa Ugi Baru. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian sawah di Desa Ugi Baru. Praktek kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Ugi Baru, karena mayoritas penduduknya adalah petani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut.

Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi

kebutuhannya sehari-hari. Dalam praktek kerjasama pertanian ini, ada yang bertindak sebagai pemilik sawah dan ada yang bertindak sebagai petani penggarap

1. Pemilik sawah

Pada wawancara yang dilakukan penulis, informan (pemilik sawah) mengemukakan alasan mengapa mereka melakukan praktek kerjasama pertanian, yaitu:

- a. Bapak Muslim, bahwa dia melakukan praktek kerjasama pertanian sawah ini karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja. Selain itu dia juga sudah tua, jadi tidak memungkinkan untuk turun langsung ke sawah.
- b. Hj. Haeria, pertama dia seorang perempuan, tidak mungkin turun langsung ke sawah, dan yang kedua dia seorang janda tua, tidak memiliki suami yang bisa mengerjakan sawah yang dimiliki. Jadi dia mencari seseorang yang mau bekerja sama untuk menggarap sawah.
- c. Hj. Nurbiah, alasannya hampir sama dengan alasan pertama dari Hj. Haeria bahwa dia adalah seorang perempuan yang tidak mampu mengelolah lahannya karena tidak adanya keahlian yang dimiliki jadi dia memutuskan untuk mempekerjakan seseorang yang kurang mampu dan memiliki keahlian dalam mengelolah sawah. Ini juga sebagai wujud bantuannya kepada penggarap yang dipilih ini karena penggarap tersebut tidak punya pekerjaan lain.¹

¹Wawancara pribadi peneliti dengan informan (pemilik sawah)

2. Penggarap Sawah

Selain kepada pemilik sawah, penulis juga melakukan wawancara kepada petani penggarap dan mereka juga mengemukakan alasannya mengapa melakukan praktek kerjasama pertanian, yaitu:

- a. Musdar. Alasannya adalah “selain dia tidak memiliki pekerjaan yang lain, dia juga ingin mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan sejak beberapa tahun yang lalu karena dia seorang sarjana pertanian.
- b. Hasman, Alibas, dan Mahmud. Alasan mereka semua sama, mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki pekerjaan yang lain sementara mereka memiliki istri dan anak-anak yang harus mereka nafkahi. Kebetulan ada yang menawarkan untuk bekerja sama jadi dia langsung menerima saja.
- c. Rahman. Alasan informan yang satu ini agak berbeda dengan yang lain. Dia mengerjakan sawah orang lain karena sawah yang dia miliki sendiri tidak luas, dia belum merasa cukup dengan penghasilan yang didapatkan. Kebetulan juga ada yang menawarkan untuk dikerjakan sawahnya jadi dia terima saja. Dari sinilah mendapatkan penghasilan tambahan.²

C. *Pelaksanaan Kerjasama dan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru*

Desa ugi baru merupakan desa yang memiliki struktur wilayah yang sangat sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman padi oleh karena itu sebagian besar penduduk desa ugi baru mata pencahariannya terletak pada sector pertanian.

²Wawancara pribadi peneliti dengan informan (penggarap sawah)

Kebanyakan dari mereka mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan kerja sama antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan secara lisan. Berdasarkan hasil wawancara kepada petani penggarap yaitu Hasman ia mengatakan “Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja cukup dengan ketemu dan kalau sudah setuju langsung mulai dilaksanakan saja”. Ada juga pemilik sawah yang bernama Hj. Haeria mengatakan “saya mengajak kerjasama dengan penggarap untuk menggarapkan sawah saya tanpa ada perjanjian hitam di atas putih, akadnya terjadi begitu saja dengan dasar saling ridho”.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang demikian ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 283

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....

Maksud dari ayat di atas adalah jagalah kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu dalam menjalankan suatu usaha kerjasama guna untuk mempertahankan hubungan sosial diantara kalian serta mendapat keberkahan Allah SWT dari hasil yang kamu dapatkan.

Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat.

Mengenai proses kerja samanya, berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, bentuk kerjasama yang dilakukan diketahui bahwa pengadaan benih dilakukan oleh kedua belah pihak, pemilik lahan dan petani penggarap sama sama mengeluarkan biaya untuk pengadaan benih. Demikian halnya dengan biaya pengelolaan yang lain seperti pengolahan tanah dalam hal ini biaya traktor, pupuk dan obat obatan, semua biaya biaya tersebut ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap kecuali proses pembenihan hingga menanam padi, proses ini membutuhkan tenaga beberapa orang yang biasa disebut sebagai buruh dan upahnya ditanggung sendiri oleh petani penggarap sawah. Mustar mengatakan bahwa “karena peraturan ini sudah digunakan oleh orang tua kita terdahulu jadi kita mengikut saja dengan peraturan yang sudah ada”.³

Setelah kurang lebih 110 – 120 hari pengolahan sawah terhitung dari proses pembenihan, maka padi dinyatakan layak panen. Pemanenan dilakukan oleh pihak lain di luar pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem pembayaran terhadap pemilik mesin panen adalah 10% dari hasil panen. Proses selanjutnya adalah sistim bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada umumnya pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Ugi Baru dalam bentuk uang. Gabah dijual terlebih dahulu oleh penggarap setelah itu hasil penjualan dikurangi untuk biaya-biaya kotor

³Wawancara pribadi peneliti dengan Mustar

kemudian sisanya dibagi dua. Pada masyarakat petani sawah di desa ugi baru sistim bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah $\frac{1}{2}$ atau 50%.

D. Pandangan Ekonomi Islam dari Segi Bentuk Kerjasama

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar dari masyarakat Desa Ugi Baru berprofesi sebagai petani dengan mengadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dimana ada pemilik lahan dan petani penggarap.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama lebih banyak sebagaimana pemilik sawah di Desa Ugi Baru yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya sendiri sehingga dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama bagi hasil atas pertanian ini. Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah (5) : 2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴

Praktek kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik sawah dan pengelola ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik sawah antara lain:

1. Menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu untuk digarap sendiri.
2. Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan tanahnya, bibit dan biaya produksi yang tidak banyak.

Sedangkan manfaat yang diperoleh petani penggarap dalam sistim bagi hasil ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi dirinya sehingga diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kerjasama yang dilakukan penggarap dan pemilik sawah tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam. Tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi penggarap khususnya. Karena dalam akad kerjasama di Desa Ugi Baru ketika masa panen tiba, penggarap sawah akan menjual hasil panennya kemudian dibagi kepada pemilik lahan sebagai seseorang yang telah mempercayakan untuk mengolah lahannya.

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Dalam menentukan keabsahan perjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Ugi Baru, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad muzara'ah untuk menjawab rumusan masalah pertama dari skripsi ini yaitu apakah praktek kerjasama pertanian di desa Ugi Baru sesuai dengan akad muzaraah atau tidak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (aqidain)

Dalam akad muzara'ah harus terdiri dari pemilik lahan dan penggarap. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum. Selain itu pihak pemilik lahan dan penggarap juga disyaratkan harus bukan orang yang murtad. Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Ugi Baru terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad.

Berdasarkan keterangan diatas maka praktek perjanjian kerjasama pertanian terkait dengan aqidain yang dilakukan oleh semua informan di Desa Ugi Baru sudah sesuai dengan akad yang berlaku.

2. Benih (Modal)

Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Ugi Baru terkait dengan modal yaitu lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal.

Berkaitan dengan modal (benih) dari akad muzara'ah harus diketahui secara jelas dan pasti. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzara'ah, maka ada empat bentuk akad muzara'ah :

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfa'at lahan, maka akad muzara'ah juga sah.
- c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Berdasarkan praktek yang terjadi di Ugi Baru, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Ugi Baru dilihat dari segi modal tidak bisa dikatakan sebagai akad muzaraah. Namun, meskipun pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian sawah di desa Ugi Baru belum sesuai dengan konsep muzara'ah dan yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan

terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah berikut ini :

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁵

Menggunakan ‘urf sebagai dasar hukum dalam bidang muamalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.⁶ Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat-syarat suatu adat kebiasaan dapat dijadikan suatu landasan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur’an dan Hadits.
- c. Tidak mendatangkan kemudharatan.⁷

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan, urf yang dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen

⁵Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqhi I*, 164

⁶Hasbi Al-Shiddeqy, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 477.

⁷Totok Jumanoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 3.

berdasarkan asal modal dan pengelolaan merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai, Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian sawah yang terjadi di desa Ugi Baru ini mengandung unsur kemaslahatan. Karena Dengan perjanjian kerjasama ini maka dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap. Semua pelaksanaan pembagian persentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat desa Ugi Baru dalam melakukan akad perjanjian kerjasama adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri.

Praktek perjanjian kerjasama pertanian sawah di desa Ugi Baru dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at islam.

Dari semua keterangan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pertanian sawah di desa Ugi Baru adalah Urf. Dimana Urf sendiri merupakan apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.⁸

⁸Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, h. 110.

E. Pandangan Ekonomi Islam dari Segi Bagi Hasil

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu hukum-hukum peribadatan maupun muamalah yang menjadi penuntun umat manusia menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, dan saling memberi manfaat antara sesama.

Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

Praktek pertanian padi sawah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ugi Baru ini dengan sistem bagi hasil pertanian dinilai oleh penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dapat ditelusuri dengan melihat bahwa di awal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya dikelola oleh petani penggarap meskipun tidak dilakukan di atas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini berarti bahwa syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad sebagai salah satu syarat muzaraah telah dipenuhi petani di desa Ugi Baru tersebut.

Aspek keadilan dalam kerjasamapun telah terpenuhi dalam pola hubungan petani di desa ini sejak awal kerjasama. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih keterbukaan antara pemilik sawah dan petani penggarap telah terjalin. Islam

sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil baik kepada Allah swt, dirinya sendiri, maupun orang lain. Perintah adil dijelaskan QS Al-Maidah (5): 8

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوْٓا۟ أَعْدِلُوْٓا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا۟ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

..... Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian, mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah

Konsep keadilan telah diterapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pertanian di Desa Ugi Baru ini. Sarana-sarana produksi seperti biaya penanaman, pembelian pupuk dan obat-obatan diketahui jumlah, harga, dan waktu

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 84

aplikasinya oleh kedua belah pihak tersebut. Sebagai contoh bila sawah terkena serangan hamah seperti wereng, penggerek batang, atau serangan tikus, terkadang pemilik lahan ikut ke sawah untuk melihat keadaan tanaman padi, memantau dan ikut merasakan keprihatinan petani penggarap.

Sistem seperti di atas, terjalin hubungan yang sangat humanis, keduanya saling ridho dalam menjalankan hubungan kerjasama ini, sehingga kehidupan bermasyarakat yang penulis amati di desa Ugi Baru sangat harmonis. Pemilik lahan dan petani penggarap bukan saja diikat oleh pekerjaan tetapi telah terjalin hubungan kekeluargaan yg kuat.

Tidak ada unsur keterpaksaan diantara mereka, keduanya mejalani pola hubungan kerja dengan hati yang tenang dan rela sehingga kerjasama bagi hasil seperti ini telah mendarah daging dan menjadi adat kebiasaan di desa in ('urf).

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-A'raf(7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹⁰

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula disisi Allah.¹¹ Oleh karena itu kebiasaan semacam ini, sah-sah saja untuk tetap dijalankan atau dipertahankan.



¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 176

¹¹Suhendrasyahalfian.blogspot.com>urf



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pemilik sawah dan petani penggarap, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru berdasarkan akad perjanjian, tidak sesuai dengan sistem muzaraah.
2. Pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Ugi Baru tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, hal ini mendasari:
 - a. Kerjasama yang dilakukan disepakati kedua belah pihak di awal akad
 - b. Kedua belah pihak melakukan kerjasama atas dasar saling ridho.
 - c. Tidak ada unsur keterpaksaan baik dari pihak pemilik sawah maupun petani penggarap.
 - d. Kerjasama yang dilakukan merupakan adat kebiasaan ('urf) di Desa tersebut.

Sedangkan 'urf sendiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian sistem bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, maka penulis akan menyampaikan saran berikut:

- a. Di awal kesepakatan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Ugi Baru ini hendaknya menggunakan perjanjian tertulis dan disertai dengan beberapa saksi agar dapat menjadi bukti dan mendapat kepastian hukum.
- b. Pemilik lahan hendaknya ikut serta menyaksikan kegiatan transaksi penjualan hasil panen yang dilakukan oleh petani penggarap.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2015.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: Diantama, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII, 2000.
- Belajar Ekonomi Syari'ah, faizlife.blogspot.com/2012/04/muzara'ah.html
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*,
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. t.tp: Erlangga, 2009.
- Cipta, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali –ART, 2005.
- Dzajuli. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Umat Press, 2002.
- Elib Unikom.ac.id diakses tanggal 27 November 2015 pukul 12:24
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Al-Habsyi, Husain. *Kamus Al-Kautsar (Arab-Indonesia)*. Surabaya: p.p.ASSEGAFF, 1977.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. t.tp: Erlangga, t.th.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Irfan. *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

- Jumantoro, Totok, et al. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2009.
- Khalil, Rasyad Hasan. *TarikhTasryi'*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidahHukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Latif, A. Azharudi. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta: Kencan, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. *HukumEkonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits EkonomiSyariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Minhajuddin. *Fikih Mu'amalah dalam Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 1999.
- Munir dan Sudarsono. *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah, *Metodologi Penelitian dan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam II*. PT. Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (HukumFiqh)*. Jakarta: Sinar Baru, 1994.
- Rokhmah, Dewi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: Jember University Press, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Shiddeqy, Hasbi. *Filsafat Hukum*. Jakarta: BulanBintang. 1975.
- Soekanto, Soerjono. *SosiologiSuatuPengantar*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqhi Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Uman, Chaerul, dkk. *Ushul N Fiqh 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Wawancara pribadi peneliti dengan Mustar
- Widjaya, Abdi. *Konfigurasi Akad dalam Islam*. Makassar, Alauddin University Press, 2014.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Gabungan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Cet. XIV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zein, Satria Effendi, M. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Berlian, biasa di panggil Lian anak tunggal dari pasangan Alm. Ayahanda Suaib dan Ibunda Hidayati. Penulis Lahir di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Oktober 1995.

Penulis memasuki jenjang pendidikan pertama pada tahun 2001 di SDN 008 Sidodadi. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar tahun 2007, dan melanjutkan pendidikan di SMP NEG.1 Wonomulyo, dan Selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN I POLMAN pada tahun 2010 dan menyelesaikannya pada tahun 2013.

Penulis langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2013. Penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Program Strata I (SI). Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR